

Analisa Perlindungan Hukum Atas Pembayaran Hak Pekerja Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRAK

Kendrick Lunando
223309042002

Pengangguran di Indonesia sering dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, ditambah lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus PHK dengan studi kasus nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/Pn Pbr dan 530/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn Jkt Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang-undang, regulasi pemerintah, dan putusan pengadilan terkait. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian tindakan perusahaan dengan hukum yang berlaku serta efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum melalui keputusan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja, termasuk pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak lainnya. Kendala dalam pelaksanaan hukum masih ditemukan, seperti pelaksanaan PHK yang tidak sesuai dengan peraturan, upah di bawah upah minimum, tidak adanya peraturan perusahaan yang jelas serta kurangnya jaminan sosial bagi pekerja. Penelitian ini merekomendasikan majelis hakim perlu memperhatikan prinsip keadilan substantif dalam setiap putusannya, peningkatan pengawasan pemerintah terhadap implementasi undang-undang ketenagakerjaan, edukasi hukum bagi pekerja, transparansi dalam proses hukum serta penguatan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Diharapkan, langkah ini dapat mendorong keadilan dalam hubungan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Analysis of Legal Protection for the Payment of Workers' Rights in Cases of Termination of Employment.

ABSTRACT

Kendrick Lunando
223309042002

Unemployment in Indonesia is often influenced by the mismatch between workers' skills and market demands, coupled with weak legal protection for employees in cases of termination of employment (PHK). This issue is exacerbated by workers' lack of understanding of their rights and companies' non-compliance with labor regulations. This study aims to analyze legal protection for workers from termination of employment cases using case studies number 80/Pdt.Sus-PHI/2023/Pn Pbr and 530/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn Jkt Pst. The research employs a normative juridical method with an analytical approach to relevant laws, government regulations, and court rulings. The data were analyzed to assess the conformity of companies' actions with applicable laws and the effectiveness of legal protections for workers. The findings indicate that the courts did not provide adequate legal protection through rulings obligating companies to fulfill workers' rights, including severance pay, service awards, and other entitlements. Challenges in law enforcement were identified, such as PHK procedures that violated regulations, wages below the minimum wage, the absence of clear company regulations, and inadequate social security for workers. This study recommends that judges pay closer attention to the principles of substantive justice in their rulings, enhance government oversight of labor law implementation, provide legal education for workers, ensure transparency in legal processes, and strengthen mediation mechanisms to resolve industrial disputes. These steps are expected to promote fairness in labor relations and improve the welfare of workers in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, and Termination of Employment.